



Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-22 Papua. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-22 Papua. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, INSTITUSIONAL DAN KEUANGAN TERHADAP
KESALAHAN PROYEKSI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Penulis :

Dewi Mustika - Universitas Jenderal Soedirman

Siti Maghfiroh - Universitas Jenderal Soedirman

Irianing Suparlinah - Universitas Jenderal Soedirman

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA XXII Papua.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-22 di Papua.

Yogyakarta, 17 June 2019

Hormat Kami,

Syaiful Ali., MIS., Ph.D., CA.

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, INSTITUSIONAL DAN KEUANGAN
TERHADAP KESALAHAN PROYEKSI ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

Full paper

Dewi Mustika Ratu
Universitas Jenderal Soedirman
dewimustika198@gmail.com

Dr. Siti Maghfiroh, S.E., M. Si., Ak.
Universitas Jenderal Soedirman
firoh.susanto@gmail.com

Dra. IrianingSuparlinah, M.Si.Ak.
Universitas Jenderal Soedirman
irianing@yahoo.com

Abstract: *The process of public sector budget preparation and approval is long, complex and complicated. Therefore, the governments tend to make budget forecast errors when they drafting their budget. The presence of budget forecast errors are influenced by political, institutional and economic factors. This research aims to examine the effect of the political coalition, political competition, population and fiscal space on local government budget forecast errors in Indonesia.*

The population of this study is all of local government in 2015. The amount of local government are 514. The writer took 197 local government from the population as the sample by using purposive sampling method. This study uses secondary data about executive and DPRD profile from website of local government and KPU, amount of population from BPS and softcopy of local government financial statement from BPK RI. Research data analysis in this research using multiple regression analysis with SPSS version 24 assistance.

The results showed that political competition, population and fiscal space influence positively the budget forecast errors. While political coalition does not effect on the budget forecast errors. In order to minimize budget forecast errors, DPRD need for increasing fiscal decentralization supervision, during the budget planning, formulation and implementation. DPRD also need to pay more attention to incumbency and complexity factor during budget forecasting.

Keywords: *Budget Forecast Errors, Political Coalition, Political Competition, Population, Fiscal Space*

1. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan pemerintah pusat dan daerah terefleksi melalui adanya pemberian otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menata keuangannya secara mandiri dan otonom sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Adapun wujud dari pengelolaan keuangan daerah tersebut kemudian dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya berisi manajemen sumber dana publik yang terbatas melalui konsep anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah (Halim dan Bawono, 2011).

Salah satu tahap pengelolaan APBD dalam konteks manajemen adalah tahap perencanaan. Perencanaan (termasuk penganggaran) merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran. Dengan demikian, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Mulyana, 2010). Tahap perencanaan merupakan penyusunan proyeksi anggaran yang akan dicapai oleh pemerintah dengan menggunakan data historis. Data historis tersebut berupa anggaran pada tahun sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman dalam memproyeksikan anggaran periode berjalan (Blanchard dan Leigh, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran adalah segala hal yang berkaitan masa depan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya didalamnya harus didasarkan pada proyeksi.

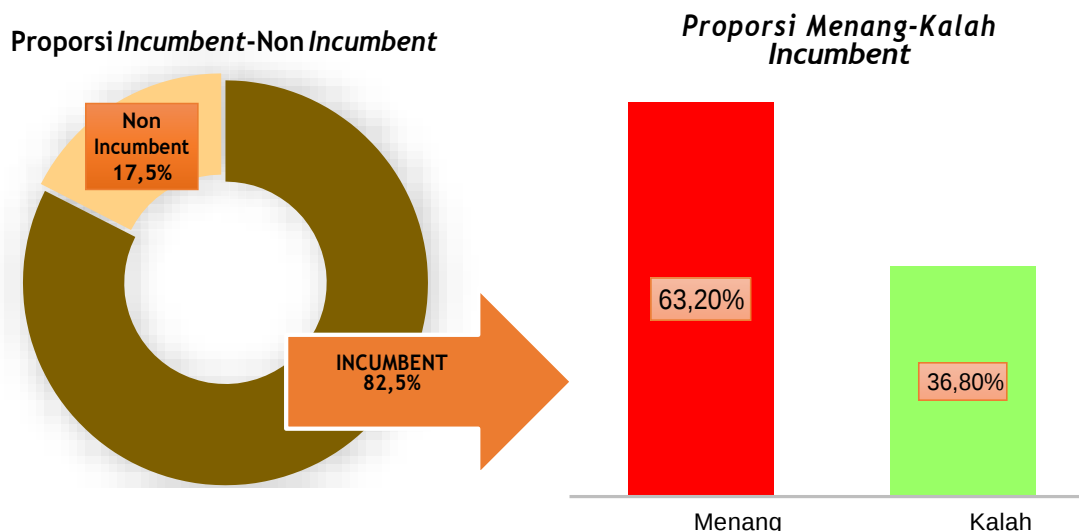
Perencanaan anggaran daerah dalam praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Jones dan Pendlebury (2010) mengkategorikan proses dalam perencanaan hingga otorisasi sebagai hal yang rumit serta memakan sumber daya yang signifikan. Banyak faktor yang turut menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan APBD. Baik faktor ekonomi maupun sisi kental dari faktor sosial politik membuat perencanaan APBD semakin terkesan kompleks (Hariadi, Restianto dan Bawono, 2010). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada pemerintah daerah merupakan proses yang panjang, kompleks dan rumit sehingga rentan dengan terjadinya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran (Kusuma dan Sutaryo, 2015).

Proses perencanaan anggaran dari segi perspektif hubungan keagenan merupakan proses yang didalamnya seringkali terdapat konflik antara pemerintah daerah sebagai agen dan rakyat selaku prinsipal. Hal ini dikarenakan pihak agen memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) berupa pengetahuan dan informasi yang lebih dibandingkan pihak prinsipal sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*). Asimetri informasi yang timbul dalam perencanaan anggaran daerah dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan diantaranya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Anggaran yang salah tersebut jelas menandakan bahwa didalamnya terdapat permainan dari pihak-pihak tertentu.

Kesalahan proyeksi anggaran erat kaitannya dengan faktor politik diantaranya koalisi dan kompetisi politik. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek tekanan popularitas sehingga dituntut untuk menyajikan angka yang bagus meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk (Deus, 2015). Politisi pada umumnya tidak memiliki insentif untuk mengadopsi praktik akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran (Alesina dan Perotti, 1996). Fakta tersebut hadir dikarenakan adanya tuntutan dalam siklus pemilihan, koalisi politik dan ideologi partai politik yang kemudian menjadi tekanan bagi pemerintah.

Koalisi politik direfleksikan dengan seberapa besar kepala daerah mendapat dukungan dari partai politik termasuk dukungan di kursi legislatif (Benito, 2015). Terlebih APBD merupakan rencana keuangan yang dibahas dan disetujui antara pihak eksekutif dan legislatif yang sarat politik anggaran (Aziz, 2016). Politik anggaran tersebut dapat dijumpai berupa tindakan meloloskan pos anggaran dalam APBD yang diketahui tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Deus, 2015). Fenomena terkait politik anggaran dapat ditemui dari beberapa kasus di beberapa daerah seperti di Sulawesi Barat terdapat anggota legislatif yang menipiskan beberapa proyek pada APBD 2016 provinsi Sulawesi Barat tanpa melalui prosedur berlaku (Mamuju.bpk.go.id, 2017). Di Jambi terdapat kasus suap Gubernur Jambi kepada anggota DPRD Jambi sebagai uang suap untuk pengesahan APBD provinsi Jambi 2018 (Liputan6news.com, 2018). Hal tersebut membuktikan bahwa masih minimnya transparansi dalam penganggaran memungkinkan pemerintah untuk memanipulasi proyeksi anggaran sesuai dengan preferensi mereka sendiri.

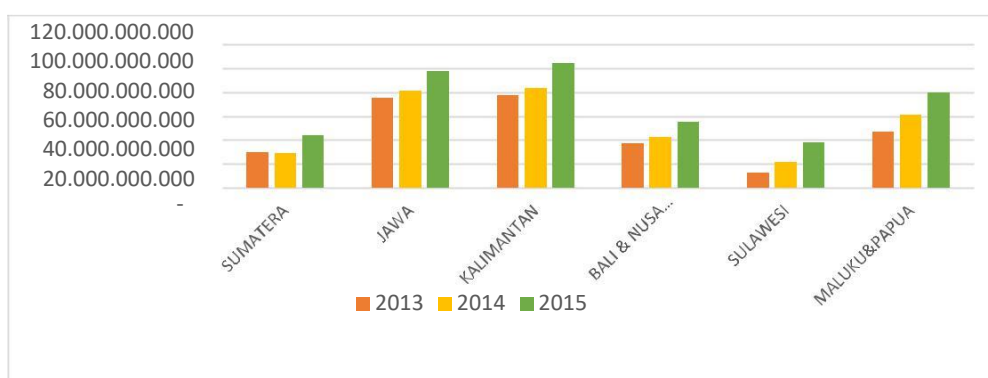
Kompetisi politik didefinisikan sebagai rivalitas para politisi untuk mendapatkan posisi mengendalikan roda pemerintahan (Bardhan dan Yang 2004). Kompetisi politik di Indonesia tercermin dengan adanya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) (Adzani dan Martani, 2014). Berdasarkan data Skala Survei Indonesia (SSI) pada pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa persentase calon petahana (*incumbent*) yang maju dalam kompetisi pilkada 2015 ada sebanyak 82,5 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63,2 persen mayoritas *incumbent* memenangkan pilkada. *Incumbent* cenderung berperilaku oportunistik dikarenakan dengan peluang dan posisi yang dimiliki para *incumbent* cenderung memanipulasi anggaran agar dapat terpilih kembali (Aidt, Veiga dan Veiga, 2011).



Sumber: Skala Survei Indonesia (2016)

Gambar 1 Proporsi *Incumbent-Non Incumbent* dan Menang-Kalah *Incumbent* pada Pilkada 2015

Pos-pos APBD yang rawan disalahgunakan oleh para *incumbent* menjelang pilkada diantaranya yaitu dana hibah dan bantuan sosial (bansos) (kpk.go.id, 2014). Hal tersebut diperkuat dengan beberapa temuan kasus korupsi dana bantuan sosial dan hibah di beberapa daerah di Indonesia diantaranya kasus Gubernur Sumatera Utara yang melakukan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 demi kemenangannya dalam pilkada (tempo.co, 2016). Diperkuat pula dengan siklus peningkatan total alokasi anggaran belanja hibah dan bansos pada Gambar 2 menunjukkan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial kabupaten/kota di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun menjelang pilkada yakni tahun 2013 dan 2014 hingga pada tahun pelaksanaan pilkada yakni 2015. Hal ini dikarenakan para *incumbent* seringkali menggunakan dana hibah dan bansos sebagai program populis untuk memperkuat kemenangan dan menarik perhatian pemilih.



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah lebih lanjut)

Gambar 2 Kenaikan Alokasi Belanja Diskresioner Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2015

Faktor institusional turut menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas daerah dalam penyusunan anggaran antara satu dengan yang lainnya tentunya berbeda (Boukaria dan Veiga, 2018). Kompleksitas daerah tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam penganggaran sehingga pemerintah tidak dapat diharapkan untuk membuat proyeksi secara tepat (Becker dan Buettner, 2007). Kompleksitas dicerminkan dengan bervariasinya faktor yang turut mempengaruhi organisasi (Maulana, 2015). Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran, siklus perekonomian, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang turut mempengaruhi penentuan besarnya ketidakpastian dalam proyeksi anggaran. (Boukaria dan Veiga, 2018).

Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk sebagai proksi dari faktor institusional. Hal ini disebabkan data mengenai jumlah penduduk merupakan masukan yang penting dalam menentukan alokasi anggaran, yakni diantaranya mengenai pemuas kebutuhan serta sarana dan prasarana yang menopang kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar maka tuntutan pelayanan pemerintah mengenai kebutuhan masyarakat akan semakin banyak dan beragam sehingga pada akhirnya membuat kesulitan dan menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran (Goeminne *et al.*, 2008).

Kesalahan proyeksi anggaran tidak hanya bergantung pada faktor politik dan institusional melainkan faktor keuangan yakni ruang fiskal pun turut berpengaruh. Ruang fiskal merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya. Adanya ruang fiskal yang besar memungkinkan pemerintah daerah terjebak pada penggunaan anggaran yang cenderung boros dan tidak berdampak pada kepentingan publik secara luas (Fitriariau.org, 2015). Diperkuat dari adanya temuan dalam laporan semester I tahun 2018 yang dilakukan oleh BPK RI, yang mengungkap sebanyak 10% kasus kerugian daerah atau setara 148 miliar merupakan kasus kelebihan pembayaran pada belanja modal (BPK RI, 2018). Permasalahan terbesar dari kasus tersebut diantaranya mengenai pengadaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pengadaan fasilitas aparatur pemerintah yang berlebihan, dan lain sebagainya.

Urgensi penelitian ini ditunjukkan dengan maraknya kesalahan proyeksi anggaran yang cenderung meningkat menjelang saat pilkada dan berujung pada kasus korupsi penyelewengan APBD (Kusuma dan Sutaryo, 2015). Ditambah lagi dengan adanya kompleksitas dalam penganggaran membuat APBD tak luput dari kesalahan proyeksi (Deus, 2015). Penelitian ini berkontribusi dalam hal mendukung peningkatan kualitas pengawasan dalam tahapan penyusunan anggaran diantaranya yakni proyeksi anggaran pemerintah daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji dan menganalisis apakah faktor politik, institusional dan keuangan mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Faktor politik yang diproksikan dengan koalisi politik dan kompetisi politik, faktor institusional yang diproksikan dengan jumlah penduduk di setiap daerah serta faktor keuangan yang menggunakan proksi ruang fiskal.

Penelitian ini merupakan gabungan dua penelitian sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Benito *et al.* (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran di Spanyol. Penelitian kedua dilakukan oleh Boukaria dan Veiga (2018) mengenai analisis determinan kesalahan proyeksi anggaran di negara Portugal dan Prancis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni, pertama pada variabel penelitian diambil dari variabel koalisi politik dan jumlah penduduk dari penelitian Benito *et al.* (2015) serta variabel kompetisi politik dan ruang fiskal dari penelitian Boukaria dan Veiga (2018). Kedua, penelitian ini mengambil lokasi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini berjudul **Pengaruh Faktor Politik, Institusional dan Keuangan terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.**

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam tataran sektor publik yakni pemerintahan juga didasarkan pada serangkaian hubungan agen dan prinsipal (Lane, 2000). Hal ini dikarenakan hubungan keagenan tersebut merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Hubungan keagenan diilustrasikan dengan hubungan antara pihak prinsipal yakni rakyat dan pihak agen yakni pemerintah daerah. Terlebih organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup banyak orang. Dengan demikian, rakyat (prinsipal) mempekerjakan pemerintah (agen) untuk melakukan tugas yakni mengelola sumber daya untuk kemudian disajikan melalui pelaporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dampak dari penerapan teori keagenan di sektor publik menimbulkan hal positif yakni dalam bentuk efisiensi. Hal ini dikarenakan seringkali prinsipal membutuhkan agen untuk melaksanakan tugas tertentu. Agen memiliki keahlian dan kemampuan yang seringkali tidak dimiliki prinsipal atau prinsipal kurang efektif dalam melaksanakan tugas daripada pihak agen. Dengan demikian tindakan agen dilakukan demi mementingkan kepentingan prinsipal juga memberikan manfaat yang baik pula bagi pihak agen.

Dalam realitanya hubungan antara agen dan prinsipal seringkali menimbulkan masalah keagenan diantaranya perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik dalam keagenan menyangkut adanya kedistorsian mengenai informasi dengan tujuan untuk menyesatkan, menyimpangkan, menyamarkan, menggelapkan atau sebaliknya membingungkan (Williamson, 1985). Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan hal negatif yakni dalam bentuk perilaku oportunistik. Asimetri informasi didefinisikan dimana agen memiliki informasi lebih detail dan banyak mengenai tugas yang dikerjakan. Sedangkan konflik kepentingan dipahami sebagai keinginan

antara pihak prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang. Hal tersebut muncul karena adanya self interest pihak agen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Perilaku oportunistik tersebut menjelaskan dengan kekuasaan yang dimiliki, agen dapat bertindak demi menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal. Agen berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri karena menguasai informasi yang lebih banyak sedangkan prinsipal mengalami keterbatasan dalam mengawasi agen karena minimnya informasi yang diperoleh pihak prinsipal. Masalah keagenan tersebut muncul dalam situasi dimana prinsipal tidak dapat secara langsung mengamati kegiatan agen sehingga timbul kecenderungan agen untuk enggan membagi informasi kinerja dengan prinsipal dan kurang maksimal mengerjakan tugas yang diberikan oleh prinsipal.

Teori keagenan dianggap relevan untuk menjelaskan penelitian ini dikarenakan dalam perumusan anggaran seringkali terjadi konflik keagenan antara prinsipal (rakyat) dan agen (pemerintah daerah). Minimnya informasi yang diperoleh rakyat dalam memonitor kegiatan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok (Hartanto dan Probohudono, 2013). Subaweh (2008) menyatakan bahwa dengan keuntungan informasi yang ada di pihak pemerintah dapat digunakan untuk melanggengkan posisinya dalam pemerintahan sehingga berdampak pada kesalahan proyeksi anggaran. Anggaran yang mengandung kesalahan menjadi bukti terjadinya asimetri informasi diantara keduanya. Kesalahan proyeksi anggaran dipengaruhi oleh berbagai hal

2.1.2 Kesalahan Proyeksi Anggaran

Penner (2001) menjelaskan bahwa penganggaran berkaitan dengan masa depan sehingga penentuan alokasinya didasarkan pada proyeksi yang seringkali tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan proyeksi anggaran secara konseptual didefinisikan sebagai minimnya tingkat akurasi dalam membuat perkiraan atau proyeksi dalam penetapan target anggaran. Kesalahan proyeksi anggaran ditandai dengan adanya selisih (varians) antara realisasi dengan anggaran. Blanchard dan Leigh (2013) menyatakan bahwa jika terdapat selisih antara realisasi anggaran pada tahun anggaran dibandingkan dengan proyeksi atau ramalan sebelumnya, maka hal tersebut menandakan terjadinya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Couture dan Imbeau (2009) menyatakan bahwa sumber kesalahan proyeksi anggaran berasal dari adanya ketidakpastian siklus ekonomi (faktor institusional). Ketidakpastian disebabkan karena adanya kompleksitas daerah dalam penyusunan anggaran sehingga membuat pemerintah pemerintah tidak dapat diharapkan untuk membuat secara tepat prakiraan yang benar (Becker dan Buettner, 2007). Hal ini dikarenakan adanya fluktuasi dalam siklus ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, inflasi yang mempengaruhi penentuan besarnya proyeksi anggaran. Kesalahan proyeksi anggaran juga erat kaitannya dengan faktor politik dikarenakan pemerintah merupakan subjek tekanan popularitas sehingga dituntut untuk menyajikan angka yang

bagus meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk (Alesina dan Perotti, 1996). Hal ini dikarenakan proyeksi anggaran seringkali berbenturan dengan kepentingan politis dan cenderung meningkat menjelang ajang pemilihan umum. Selain itu kesalahan proyeksi anggaran juga disebabkan oleh factor keuangan yakni ruang fiskal pun turut berpengaruh. Ruang fiskal sendiri merupakan keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya (DJPK, 2014).

Kesalahan proyeksi anggaran erat kaitannya dengan faktor politik dikarenakan pemerintah merupakan subjek tekanan popularitas sehingga dituntut untuk menyajikan angka yang bagus meskipun melalui cara menyamarkan hasil yang buruk. Politisi pada umumnya tidak memiliki insentif untuk mengadopsi praktik akuntansi yang transparan dalam proses anggaran (Alesina dan Perotti, 1996). Faktor politik dapat diproksikan dengan koalisi dan kompetisi politik. Koalisi politik dapat didefinisikan berupa dukungan partai politik kepada kepala daerah (Benito *et al.*, 2015). Dukungan tersebut terkadang menimbulkan konsekuensi berupa perjanjian diantara pihak yang terlibat. Dengan kesepakatan yang telah dibuat tersebut membuat penyusunan proyeksi anggaran rentan dengan tekanan politik (Nofsinger, 2004). Hal ini dapat dilihat dalam tahapan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang didalamnya terdapat tawar menawar, lobi serta konflik kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan (Ritonga dan Alam 2010). Semakin banyak dukungan dari koalisi politik mengakibatkan bias dalam proyeksi anggaran pemerintah daerah juga semakin besar. Hal ini dikarenakan APBD merupakan rencana keuangan yang dibahas serta disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD yang seringkali erat kaitannya dengan politik anggaran (Aziz, 2016). Kompetisi politik menggambarkan seberapa besar rivalitas politik antara petahana (*incumbent*) dengan para rival politiknya (Diani 2016). Hal tersebut dapat dinilai dengan seberapa besar peluang *para incumbent* untuk memenangkan pilkada. Pilkada hadir sebagai arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk menang dan mendapat kekuasaan lokal. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat persaingan politik pada pemilihan umum kepala daerah maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran.

Kompleksitas sebagai factor institusional dicerminkan dengan jumlah penduduk yang turut mempengaruhi penentuan besarnya ketidapastian dalam proyeksi anggaran. (Boukaria dan Veiga, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk merupakan komponen utama penentuan dasar layanan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Semakin besar jumlah penduduk maka akan memerlukan anggaran yang semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu dengan jumlah penduduk yang semakin besar maka besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memproyeksikan anggaran (Goeminne *et al.*, 2008).

Ruang fiskal juga menjadi salah satu factor terjadinya kesalahan proyeksi anggaran. Ruang fiskal merujuk pada ketersediaan ruang bagi pemerintah mengenai keputusan yang terkait dengan anggaran. Nota Keuangan dan APBN (2010) mendefinisikan ruang fiskal sebagai pengeluaran tidak terikat yang dilakukan pemerintah diantaranya mengenai pengeluaran membangun proyek-proyek infrastruktur tanpa menyebabkan terjadinya gejolak ketidakseimbangan fiskal. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah tersebut, dikarenakan kecenderungan pemerintah daerah akan membelanjakan anggaran secara boros dan tidak berdampak pada kepentingan publik secara luas (Fitriariau.org, 2015).

2.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.2.1 Koalisi Politik dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Perilaku oportunistik dalam hubungan keagenan ditunjukkan melalui mekanisme koalisi dalam partai politik. Koalisi politik dapat terefleksi dengan dukungan dari partai politik termasuk dukungan di kursi legislatif. Adanya dukungan mayoritas partai politik di DPRD menyebabkan penyusunan dan penetapan APBD akan semakin cepat dikarenakan adanya perilaku oportunis dari kedua belah pihak yakni diantaranya dengan memasukkan unsur-unsur kepentingan politik ke dalam APBD (Sutaryo dan Tiara, 2015).

Semakin besar koalisi politik maka semakin besar terjadi kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyak pendukung di DPRD sebagai konsekuensinya pihak eksekutif akan memasukkan proyek titipan partai politik agar penetapan APBD dapat berjalan lancar. Penetapan APBD tersebut memungkinkan dilakukan tanpa melalui pengecekan yang teliti oleh DPRD dikarenakan kepentingan DPRD tersebut sudah terwakili dalam APBD (Fauziah, 2017). Setiap anggaran yang diajukan kepala daerah akan selalu disetujui karena terdapat permainan politik anggaran yang sarat dengan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri.

Serritzlew (2005) dalam penelitiannya di Denmark menyatakan bahwa jika pihak eksekutif didukung oleh mayoritas partai politik di legislatif seringkali menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tingkat over spending yang cenderung lebih tinggi. Penelitian di Belgia oleh Goemmine *et al.* (2008) dan di Spanyol oleh Lago Penas dan Lago Penas (2008), Benito *et al.* (2015) juga menunjukkan bahwa pemerintah dengan dukungan partai yang lebih besar secara signifikan kurang cermat dalam memproyeksikan anggaran pendapatan sehingga menimbulkan kesalahan. Sedangkan di Indonesia sendiri, Kusuma dan Sutaryo (2015), Syahida (2016), dan Widyastuti (2017) menyebutkan bahwa dukungan politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme politik anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan alokasi anggaran daerah. Berdasarkan pemaparan logis diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Koalisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.2 Kompetisi Politik dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Teori keagenan menyatakan bahwa perilaku oportunistik pihak agen menyebabkan adanya konflik keagenan (Williamson, 1985). Perilaku tersebut ditandai dengan pihak agen memanfaatkan jabatan dan posisi strategis yang dimiliki untuk memenuhi kepentingan pribadi melalui korupsi, suap, dan sumber lain. Hal tersebut tercermin dengan adanya kepala daerah *incumbent* yang memanfaatkan posisi yang dimilikinya untuk memanipulasi kebijakan anggaran agar dapat memenangkan kompetisi politik.

Semakin tinggi intensitas kompetisi politik maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan kepala daerah yang mencalonkan kembali (*incumbent*) akan bekerja secara baik di mata masyarakat dengan menyediakan berbagai macam program populis pemerintah seperti pemberian hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk menarik perhatian pemilih agar memilih *incumbent* kembali. Pelaksanaan berbagai macam program tersebut seringkali rentan dengan adanya permainan anggaran. Dengan demikian berdampak terhadap timbulnya kesalahan dalam memproyeksikan APBD.

Penelitian Mayper *et al.* (1991) di Amerika Serikat menyatakan bahwa semakin ketat persaingan politik maka para *incumbent* seringkali membesar-besarkan pencapaian dan prestasi mereka melalui manipulasi anggaran. Aidt *et al.* (2011) menyelidiki secara teoretis dan empiris adanya hubungan antara insentif memainkan anggaran dan persaingan elektoral. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya insentif para *incumbent* dalam memanipulasi kebijakan anggaran dengan tujuan elektoral. Boukaria dan Veiga (2016, 2018) menyatakan bahwa di Portugis dan Prancis para *incumbent* seringkali memanipulasi pos anggaran tertentu untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang lebih tinggi dan penurunan tarif pajak sehingga memiliki efek positif terhadap popularitas *incumbent*. Di Indonesia sendiri penelitian oleh Widyastuti (2017) menjelaskan bahwa periode jabatan kepala daerah *incumbent* berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.3 Jumlah Penduduk dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal memberikan tugas dan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan prinsipal. Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah sebagai agen akan berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, disusunlah berbagai program dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu penentu utama dalam kebutuhan masyarakat diantaranya adalah komponen jumlah penduduk.

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai banyaknya penduduk di suatu daerah yang dihitung berdasarkan sensus penduduk. Semakin besar jumlah penduduk membuat tingkat kompleksitas

pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang semakin besar, tuntutan mengenai layanan dasar kebutuhan masyarakat semakin banyak dan beragam sehingga pada akhirnya membuat kesulitan proyeksi menjadi lebih rumit dan tingkat kesalahan proyeksi anggaran pun meningkat.

Hasil penelitian Benito *et al.* (2015) di Spanyol menyatakan bahwa semakin besar populasi menyebabkan estimasi yang terlalu tinggi di kedua sisi pendapatan dan pengeluaran. Dengan besarnya jumlah populasi tersebut menyebabkan ketidakakuratan dalam prakiraan. Sedangkan Boukaria dan Veiga (2018) di Prancis dan Portugal menemukan bahwa jumlah populasi penduduk berpengaruh positif dalam menjelaskan tingkat kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk cenderung menunjukkan kompleksitas yang tinggi sehingga dengan demikian menyebabkan kesulitan proyeksi anggaran yang lebih besar. Dapat diformulasikan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

2.2.4 Ruang Fiskal dan Kesalahan Proyeksi Anggaran

Ruang fiskal juga berkaitan dengan masalah keagenan jika dihubungkan dengan kecenderungan eksekutif untuk berperilaku oportunistik dalam penganggaran demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya (Sutaryo dan Winarna, 2013). Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah sebagai agen dengan ruang fiskal yang ada akan berupaya menciptakan terobosan-terobosan baru dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan sesuai dengan prioritas. Dengan demikian dirancanglah program dan terobosan yang seringkali membutuhkan pembiayaan yang besar. Seringkali dengan dana yang besar rentan dengan permainan anggaran sehingga menyebabkan adanya pemborosan anggaran dan tidak berdampak pada kepentingan publik.

Ruang fiskal yang tinggi menandakan semakin besar keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran. Dengan demikian semakin besar fleksibilitas tersebut dapat dijadikan sebagai peluang tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyalahgunakan anggaran sehingga berujung pada adanya kesalahan memproyeksikan anggaran. Hasil penelitian Couture dan Imbeau (2009) dan Monika *et al.* (2015) menyatakan bahwa semakin besar ruang dan kapasitas transfer dari negara ke daerah maka semakin besar varians anggarannya. Sedangkan penelitian oleh Supriyanto (2015) menyatakan bahwa ruang fiskal yang besar mempunyai kecenderungan untuk dikorupsi. Oleh karena itu ruang fiskal yang besar rentan terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Ruang fiskal berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kausatif yakni menjelaskan pengaruh Koalisi Politik (X_1), Kompetisi Politik (X_2), Populasi Penduduk (X_3), dan Ruang Fiskal (X_4) terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2015 yakni berjumlah 514 daerah. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun jumlah sampel yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 197 pemerintah kabupaten/kota. Prosedur pemilihan sampel disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah kabupaten/kota tahun 2015 di Indonesia	514
2	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pemilukada 2015	(283)
3	Pemerintah kabupaten/kota dengan kepala daerah Tidak mencalonkan kembali pada pemilukada 2015	(34)
4	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak menyajikan data untuk pengukuran variabel	(0)
Jumlah Observasi Sebagai Sampel		197

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data profil eksekutif dan DPRD yang berasal dari *website* resmi pemerintah daerah dan KPU, jumlah penduduk berasal dari BPS, dan *softcopy* laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK RI. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi yakni mencari data sekunder berupa profil kepala daerah, DPRD, jumlah penduduk serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 24.0. Pengujian empiris hubungan antara koalisi politik, kompetisi politik, jumlah penduduk dan ruang fiskal menggunakan model analisis sebagai berikut:

$$(BFE) = \beta_0 + \beta_1 (KOAL) + \beta_2 (KOMP) + \beta_3 (POP) + \beta_4 (FISKAL) + \epsilon_i$$

Keterangan :

BFE	: Kesalahan Penilaian Anggaran
KOAL	: Koalisi Anggaran
KOMP	: Kompetisi Anggaran
POP	: Jumlah Populasi Penduduk
FISKAL	: Ruang Fiskal
B	: Koefisien Regresi
ϵ_i	: Standar Error

Tabel 2 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Kesalahan Proyeksi Anggaran (BFE)	Ketidakakuratan dalam membuat proyeksi yang ditandai dengan adanya selisih antara realisasi dan anggaran pada tahun berjalan (Benito, 2015).	a. Menghitung rasio kesalahan proyeksi anggaran (BFE) dari masing-masing anggaran pendapatan dan belanja yakni: $(BFE \text{ Pendapatan, Belanja}) = \frac{ Realisasi - Anggaran }{Anggaran}$ b. Menghitung nilai rata-rata kesalahan proyeksi anggaran (BFE rerata) dengan menggunakan hasil yang telah diperoleh dari persamaan BFE pendapatan dan belanja yakni : $BFE_{rerata} = \frac{BFE \text{ pendapatan} + BFE \text{ belanja}}{2}$
2	Koalisi Politik (KOAL)	Seberapa besar kepala daerah mendapat dukungan atau bantuan dari partai politik (Benito, 2015)	Jumlah kursi legislatif partai pendukung dibagi dengan jumlah keseluruhan kursi legislatif di masing-masing kabupaten/kota (Sutaryo dan Winarna, 2013) $KOAL = \frac{\sum \text{Kursi Legislatif Partai Pendukung}}{\sum \text{Kursi Legislatif Kabupaten/Kota}}$
3	Kompetisi Politik (KOMP)	Seberapa besar persaingan antara kepala daerah yang menjabat saat ini (<i>incumbent</i>) dengan saingan-saingan politiknya untuk memenangkan pemilihan (Diani, 2016).	Variabel dummy dengan angka 1 jika <i>incumbent</i> memenangkan pemilihan dan 0 jika <i>incumbent</i> kalah dalam pemilihan.
4	Jumlah Penduduk (POP)	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2018).	Sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS
5	Ruang Fiskal (FISKAL)	Fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD (DJPK, 2014).	Ruang fiskal dihitung menggunakan rasio DJPK (2014): $Rasio = \frac{(PD - DAK - PH - DOK - DD - BP)}{PD}$ Keterangan: PD = Total Pendapatan Daerah DAK = Dana Alokasi Khusus PH = Pendapatan Hibah DOK = Dana Otonomi Khusus/Penyesuaian DD = Dana Darurat BP = Belanja Pegawai

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISIS DATA

4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan informasi bahwa rata-rata pemerintah daerah memiliki tingkat kesalahan proyeksi anggaran sebesar 0,085 (8,5 persen) dengan perolehan nilai tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 0,353, sedangkan nilai terendah sebesar 0,012 yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan nilai rata-rata variabel koalisi politik adalah 0,36981 dengan standar deviasi sebesar 0,191503. Menunjukkan bahwa dukungan mayoritas kursi legislatif terhadap kepala daerah di pemerintah daerah kabupaten/kota Indonesia tergolong minim yakni sebesar 0,36981 (37 persen).

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BFE	0,012	0,353	0,08544	0,048904
KOALISI	0	1	0,36981	0,191503
KOMPETISI	0	1	0,63	0,483
POPULASI	18.186	3.534.114	511.123	575.250,236
FISKAL	0,075	0,703	0,35432	0,145037

Tabel 4 untuk variabel kompetisi politik menunjukkan bahwa jumlah pemerintah kabupaten/kota dengan kategori *incumbent* yang menang terdapat sebanyak 125 kabupaten/kota atau 63,5 persen dari total keseluruhan sedangkan pemerintah kabupaten/kota dengan kategori *incumbent* kalah dalam pemilihan terdapat sebesar 72 kabupaten/kota atau 36,5 persen. Kesimpulannya, secara mayoritas *incumbent* memenangkan konstetasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015.

Tabel 4 Statistik Frekuensi untuk Kompetisi Politik

	Jumlah	Persentase	Persentase Kum Ulatif
Kalah (0)	72	36,5	36,5
Menang (1)	125	63,5	100,0
Total	197	100,0	

Variabel populasi penduduk dalam penelitian ini menghasilkan nilai minimum sebesar 18.186 yang dimiliki oleh Kabupaten Supiori dan nilai maksimum dimiliki oleh Kabupaten Bandung yaitu

sebesar 3.534.114. Adapun variabel ruang fiskal menghasilkan nilai terendah sebesar 0,075 yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota Bontang yaitu sebesar 0,703 dengan nilai rata-rata 0,35432. Nilai *mean* yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Sample Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini menerangkan apabila nilai *Asymptotic significancy* lebih dari 0,05 maka data dinyatakan telah terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) diperoleh nilai *asymptotic significancy* sebesar 0,197 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan menggunakan prosedur SPSS yakni dengan melihat hasil *colinearity statistic* khususnya dalam kolom VIF dan nilai *tolerance* tiap-tiap variabel independen. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari adanya multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai *tolerance* dan VIF seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga terbebas dari adanya gejala multikolinieritas.

4.1.2.3 Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini menggunakan metode *glejser*, yakni meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila signifikansinya (Sig.) lebih dari 0,05 maka dapat dipastikan data tidak mengandung heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian didapat bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih dari besar dari 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam data penelitian ini.

4.1.3 Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{BFE} = -2,840 + 0,231\text{KOAL} + 0,209\text{KOMP} + 0,060\text{POP} + 0,209\text{FISKAL} + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar -2,840 berarti variabel dependen kesalahan proyeksi anggaran akan bernilai -2,840 satuan apabila variabel independen yang terdiri dari koalisi politik, kompetisi politik, populasi penduduk dan ruang fiskal bernilai nol. Adapun untuk koefisien variabel koalisi politik, kompetisi politik, jumlah penduduk dan ruang fiskal menunjukkan masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen yakni kesalahan proyeksi anggaran.

4.1.4 Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R²* berdasarkan pengujian adalah 0,74 (74%) menunjukkan bahwa variabel koalisi politik (X_1), kompetisi politik (X_2), populasi penduduk (X_3), ruang fiskal (X_4) mampu menjelaskan variabel kesalahan proyeksi anggaran (Y) sebesar 74% sedangkan sisanya yakni sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

4.1.5 Uji Goodness Of Fit

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model layak digunakan atau tidak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 4,901 > F_{tabel} sebesar 2,42 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,001 \leq 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini dikategorikan layak.

4.1.6 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel koalisi politik (X_1), kompetisi politik (X_2), jumlah penduduk (X_3) dan ruang fiskal (X_4) terhadap variabel kesalahan proyeksi anggaran (Y) maka digunakanlah uji t.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji t

No	Variabel	t_{hitung}	Sig	Keterangan
1	Koalisi (X_1)	1,284	0,192	Tidak Berpengaruh
2	Kompetisi (X_2)	2,803	0,003	Berpengaruh
3	Populasi (X_3)	2,169	0,016	Berpengaruh
4	Fiskal (X_4)	2,840	0,001	Berpengaruh

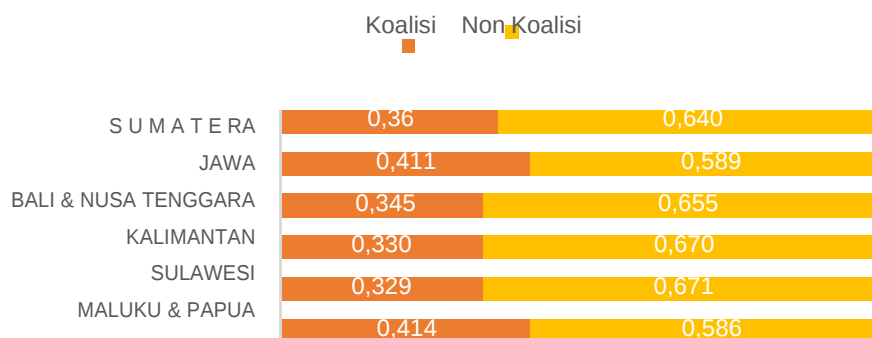
Hasil analisis dengan menggunakan alpha (α) sebesar 0,05 (uji satu sisi) dan t_{tabel} sebesar 1,652. Berdasarkan pengujian uji t variabel koalisi politik (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Sedangkan variabel kompetisi politik (X_2), jumlah penduduk (X_3) dan ruang fiskal (X_4) secara parsial berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran (Y).

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pengaruh Koalisi Politik terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

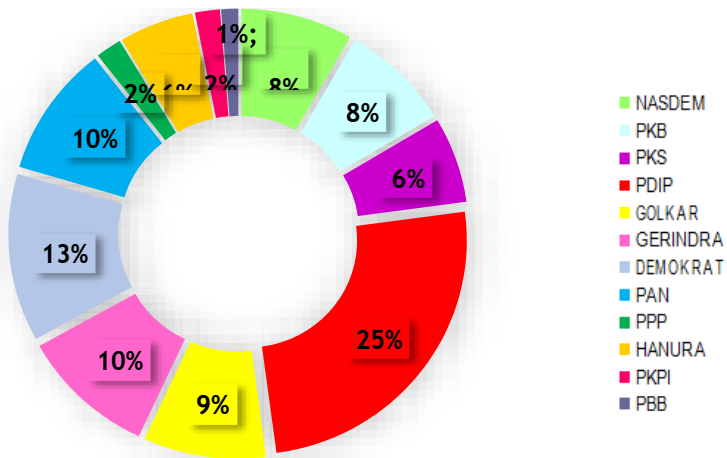
Berdasarkan hasil uji parsial sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap adanya kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini dikarenakan bukti empiris penelitian menunjukkan bahwa ada atau tidaknya koalisi politik, kesalahan proyeksi anggaran tetap terjadi. Bukti empiris penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yakni proporsi dukungan baik di setiap wilayah maupun secara keseluruhan serta tingkat fragmentasi partai politik.

Hasil analisis penelitian tertera pada gambar 4 menunjukkan bahwa sebaran persentase dukungan politik berada dibawah 50 persen di setiap wilayah. Secara keseluruhan, pada lampiran 3 menunjukkan bahwa dukungan mayoritas legislatif terhadap kepala daerah hanya sebesar 37 persen di pemerintah kabupaten/kota. Proporsi dukungan politik di kursi legislatif kepada kepala daerah yang minim di pemerintah kabupaten/kota menjadi penyebab tidak terbuktinya hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan baik anggota legislatif dalam partai koalisi dan non koalisi memiliki ambisi dan motivasi kepentingan yang sama. Dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah dalam perencanaan dan pengesahan APBD yang tidak hanya melakukan suap ke partai koalisi saja melainkan juga partai non koalisi. Dengan demikian kesalahan proyeksi anggaran tetap terjadi:



Gambar 3 Proporsi Koalisi dan Non Koalisi di DPRD

Fragmentasi partai politik yang tinggi di kursi legislatif turut menjadi penyebab variabel koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal tersebut ditandai dengan tersebarnya dukungan partai sehingga minimnya dominasi partai. Hal tersebut tertera pada gambar 4 yang menunjukkan persentase proporsi masing-masing partai berada dibawah 50 persen. Dengan fragmentasi yang tinggi menyebabkan pembahasan dalam APBD seringkali menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif yang tak berkesudahan dan seringkali berujung pada *deadlock*. Untuk mengurangi kebuntuan dalam pengambilan keputusan mengenai APBD seringkali pihak eksekutif melakukan negosiasi baik dalam bentuk korupsi maupun suap demi mempermudah pembahasan APBD di tengah kondisi DPRD yang tidak sepeham. Sistem pengawasan yang lemah inilah yang menyebabkan kesalahan proyeksi tetap terjadi.



Gambar 4 Proporsi Partai Politik di Kursi Legislatif DPRD

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pihak agen maupun prinsipal. Dengan adanya benturan kepentingan tersebut rentan terhadap perilaku oportunis. Hal tersebut tercermin dengan adanya korupsi, suap atau permainan politik anggaran lainnya dalam proses penyusunan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Bischoff dan Gohout (2006, 2010), Boukaria dan Veiga (2016), Fauziah (2017) dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan antara pihak eksekutif dan legislatif membuat penyusunan anggaran sehingga koalisi politik tidak mempengaruhi kesalahan proyeksi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Serritzlew (2005) Goemmine *et al.* (2008), Lago Penas dan Lago Penas (2008), Benito *et al.* (2015), Kusuma dan Sutaryo (2015), Syahida (2016) dan Widyastuti (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya fenomena tingkat *overspending* yang tinggi ketika partai koalisi mengusulkan anggaran menunjukkan bahwa koalisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.2 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Hasil uji t atas variabel kompetisi politik disimpulkan bahwa variabel kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Berdasarkan hasil diperoleh fakta bahwa mayoritas *incumbent* memenangkan pemilihan kepala daerah yakni sebesar 63,5 persen. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa *incumbent* memanfaatkan posisi, jabatan dan informasi yang dimilikinya untuk memanipulasi anggaran pos-pos belanja tertentu dalam rangka keuntungan politis pada saat pemilihan.

Dalam lingkungan politik yang sangat kompetitif tersebut para *incumbent* menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pemilih. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa *incumbent* berupaya menyediakan berbagai program populis diantaranya bantuan sosial dan hibah dengan tujuan agar dapat menarik simpati dan memenangkan konstetasi pemilihan. Penyediaan berbagai program tersebut seringkali rentan dengan permainan anggaran sehingga semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran pada pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat kesenjangan informasi antara pihak agen (pemerintah) dan prinispal (masyarakat). Dengan kesenjangan informasi memungkinkan para *incumbent* memanfaatkan posisi strategis yang dimilikinya dan cenderung berperilaku oportunistis. Perilaku oportunistis tersebut ditunjukkan dengan para *incumbent* yang memanipulasi proyeksi anggaran pada saat menjelang pemilihan umum yang menyebabkan kesalahan dalam proyeksi anggaran.

Sejalan dengan penelitian Aidt *et al.* (2011) menyatakan bahwa ketika kepala daerah menghadapi pemilihan umum yang ketat mereka cenderung memanipulasi anggaran agar dapat terpilih kembali. Para *incumbent* berusaha untuk tampil unggul dan populer dengan melebihkan-lebihkan kinerja yang dicapai meskipun dengan memanipulasi proyeksi anggaran (Meyper *et al.*, 1991). Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengeluaran yang berlebih (*overspending*) untuk program yang berdampak positif pada popularitas *incumbent* (Boukaria dan Veiga, 2016, 2018). Berbeda halnya dengan penelitian Lago Penas dan Lago Penas (2008), Bischoff dan Gohout (2006, 2010), Kusuma dan Sutaryo (2015), Putri (2018), Fauziah (2017), dan Rossa (2017) yang menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula kesalahan proyeksi anggaran. Dengan semakin besar jumlah penduduk maka semakin kompleks dalam menentukan proyeksi anggaran yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena semakin kompleks dan beragam pula kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang harus dipenuhi. Komplektisitas tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam merumuskan formulasi kebijakan anggaran menyebabkan kesalahan proyeksi anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penjelasan dalam teori agensi. Dalam tataran teori agensi dijelaskan bahwa dalam upaya melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat (prinsipal), pemerintah daerah sebagai agen berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator penentu kebutuhan masyarakat diantaranya adalah jumlah penduduk yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan proyeksi anggaran. Namun sayangnya karena adanya ketidakpastian kebutuhan masyarakat yang kompleks cenderung membuat kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Temuan ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Goemmine *et al.* (2008), Boukaria dan Veiga (2018), Benito *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa komplektisitas dalam memenuhi

kebutuhan dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menyebabkan kesalahan dalam mengestimasi anggaran. Hal tersebut ditandai dengan semakin tinggi ketidakakuratan baik dari sisi pendapatan dan pengeluaran dalam memfasilitasi kebutuhan penduduk yang semakin kompleks dan beragam. Namun bertentangan dengan penelitian Rossa (2017), Serritzlew (2005), Bischoff dan Gohout (2006, 2010), Meyper *et al.* (1991) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak dapat menjelaskan kesalahan proyeksi anggaran.

4.2.4 Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran

Hasil uji t menunjukkan ruang fiskal yang besar menyebabkan semakin besar pula kepala daerah cenderung mengalami kesalahan proyeksi anggaran. Hasil analisis yang tertera menyatakan bahwa rata-rata rasio ruang fiskal seluruh daerah sampel cukup tinggi yakni 35 persen. Dengan demikian seluruh sampel pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki fleksibilitas keuangan yang sangat tinggi untuk dimanfaatkan membiayai kebutuhan belanja daerah.

Dalam teori agensi menyatakan bahwa dengan besarnya fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan anggaran cenderung menimbulkan masalah yakni berkenaan dengan perilaku oportunistik dari aktor politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dengan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah akan mencoba memanipulasi anggaran dengan menciptakan terobosan program baru yang membutuhkan dana besar. Dana yang besar inilah kemudian rentan dipermainkan dan disalahgunakan sehingga menyebabkan kesalahan dalam memproyeksikan anggaran.

Couture dan Imbeau (2009) dan Monika *et al.* (2015) menyatakan bahwa semakin alokasi anggaran dari pusat ke daerah maka semakin besar penyimpangan anggarannya akibat minimnya pengawasan desentralisasi tersebut. Supriyanto (2015) menyatakan bahwa ruang fiskal seringkali dimanfaatkan untuk dikorupsi dan dimanipulasi. Akan tetapi bertolak belakang dengan Mayper *et al.* (1991), Asatryan *et al.* (2015), Brender (2003), Jonung *et al.* (2016) dan Boukari dan Veiga (2018) menyatakan bahwa ruang fiskal tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran.

5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pengaruh faktor politik, institusional dan keuangan terhadap kesalahan proyeksi anggaran maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Berdasarkan hasil analisis diperoleh dukungan mayoritas di kursi legislatif terhadap kepala daerah hanya sebesar 37 persen serta tingginya tingkat fragmentasi partai politik di kursi legislatif membuat secara keseluruhan minimnya pengaruh koalisi partai politik yang dominan dan unggul dalam pemerintahan.

- b. Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan semakin tinggi intensitas kompetisi politik, maka para incumbent memanfaatkan posisinya untuk memanipulasi anggaran demi memenangkan pemilihan umum sehingga berdampak pada semakin besarnya kesalahan proyeksi anggaran.
- c. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan semakin besar jumlah penduduk maka semakin kompleksitas dalam menganggarkan pelayanan kebutuhan masyarakat, kompleksitas tersebut menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam memformulasikan kebijakan anggaran sehingga berdampak pada semakin besarnya kesalahan proyeksi anggaran.
- d. Ruang fiskal berpengaruh positif terhadap kesalahan proyeksi anggaran. Hal ini disebabkan semakin besar ruang fiskal maka fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah dalam menyusun anggaran semakin tinggi dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang cenderung boros sehingga berdampak pada semakin besarnya kesalahan proyeksi anggaran.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan yang dijumpai yakni dalam hal ketersediaan data berupa LKPD yang telah diaudit BPK periode pemilu terdekat yakni 2018 sehingga mengalami kesulitan dalam meneliti kesalahan proyeksi anggaran pada tahun 2018. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan data penelitian terbaru untuk dapat menangkap hasil penelitian yang lebih bagus.

5.3 IMPLIKASI

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui ruang fiskal yang dimiliki. Dampak positif dengan adanya fleksibilitas keuangan tersebut diantaranya dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi masing-masing pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan. Namun di sisi lain, dengan ruang fiskal yang dimiliki seringkali dimanfaatkan bagi pihak tertentu untuk berperilaku oportunistik yang kemudian menyebabkan beberapa masalah diantaranya yakni kesalahan proyeksi anggaran.

Hasil penelitian ini bermanfaat terutama bagi DPRD dalam rangka pengawasan desentralisasi keuangan pemerintah daerah. Untuk meminimalkan kesalahan proyeksi anggaran, selama perencanaan, perumusan hingga implementasi anggaran, DPRD perlu lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi kesalahan proyeksi anggaran yakni kompetisi politik, jumlah penduduk dan ruang fiskal. Dengan demikian diharapkan kesalahan proyeksi anggaran pada tahun-tahun kedepannya dapat dihindari dan diminimalisir.

Kesalahan proyeksi anggaran cenderung meningkat ketika tahun kompetisi politik sudah dekat. Hal ini ditunjukkan dengan para *incumbent* memanfaatkan posisi yang dimiliki dengan cara memainkan ruang fiskal yang dimiliki. Diantaranya yakni dengan memainkan alokasi penyediaan program hibah dan bantuan sosial dengan tujuan meningkatkan tingkat keterpilihannya kembali. Hal ini dikarenakan para *incumbent* cenderung responsif terhadap kebutuhan pemilih pada saat menjelang pilkada. Salah satu komponen penentu kebutuhan tersebut adalah jumlah penduduk. Jika *incumbent* mampu memenuhi kebutuhan penduduk maka penduduk sebagai pemilih akan puas dengan kinerja *incumbent* dan probabilitas untuk menang kembali akan tinggi. Namun sayangnya, faktor kompleksitas dalam menentukan kebutuhan penduduk yang banyak dan beragam membuat sulit untuk menentukan proyeksi yang tepat dan akurat. Dengan demikian kesalahan proyeksi anggaran pun terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, Akhmad H. dan Martani, Dwi. (2014). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidapatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok. Diakses dari: <https://staff.blog.ui.ac.id>
- Aidt, T., Veiga, F., dan Veiga, L. (2011). Election Results And Opportunistic Policies: A New Test Of The Rational Political Business Cycle Model. *Public Choice*. 148. 21–44. Doi: 10.1007/s11127-010-964
- Alesina, A. dan Perotti, R. (1996). Fiscal Discipline and the Budget Process. *The American Economic Review*. 86. 401–407.
- Asatryan, Z., Feld, L.P., dan Geys, B. (2015). Partial fiscal decentralization and sub-national government fiscal discipline: empirical evidence from OECD countries. *Public Choice*. 163. 307–320. Doi: 10.1007/s11127-015-0250-2.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty.a (2016). Politik Anggaran Dalam pelaksanaan pilkada Serentak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 42. 51-64. Diakses dari: <https://www.jmi.ipisk.lipi.go.id>
- Bardhan, Pranab dan Yang, Tsung-Tao. (2004), Political Competition in Economic Perspective. *BREAD Working Paper*. 078. Diakses dari: <https://eml.berkeley.edu>
- Becker, I. and Buettner, T. (2007). Are german tax-revenue forecasts flawed ? *Ifo Institute and Munich University*. Diases dari: <https://www.researchgate.net>
- Benito, B., Guillamón, M.-D., dan Bastida, F., (2015). Budget Forecast Deviations In Municipal Governments: Determinants And Implications. *Australia Accounting Review*. 25. 45–70. Doi: 10.1111/auar.1207
- Bischoff, I. and Gohout, W. (2006). Tax Projections in German States – Manipulated by Opportunistic Incumbent Parties?. *Finanzwissenschaftliche Arbeitspapiere* 74. Diakses dari: <http://www.econstor.eu/>
- Blanchard, O dan Leigh, D. (2013). Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers. *IMF Working Paper*. No. 13/1. Diakses dari: <https://www.imf.org>
- Boukaria, Mamadaou dan Veiga, Jose F. (2016). The Effect Of Politics on Budget Forecast Errors: Comparative Evidenve. *65th Annual Meeting of the French Economic Association*. Diakses dari: <https://afse2016.sciencesconf.org/>

- BPK RI. (2017). *Proyek Titipan Diduga Rugikan Negara Rp.150 M*. Mamuju: Penulis. Diakses dari : <http://www.mamuju.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Proyek-titipan-diduga-rugikan-negara-150M.pdf>. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017*. Jakarta:
- Brender, A. (2003). The effect of fiscal performance on local government election results in Israel: 1989-1998. *Journal Public Economy*. 87. 2187–2205
- Couture, J. dan Imbeau, L. (2009). Do Governments Manipulate Their Revenue Forecasts? Budget Speech and Budget Outcomes in the Canadian Provinces. *Studies in Public Choice*. 15. 155-166. Doi: 10.1007/978-0-387-89672-4_9
- Diani, Rosita Putri. (2016). Analisis Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: <https://digilib.uns.ac.id>
- Deus, Joseph D avid Barroso Vasconcelos (2015). Empirical evidence on fiscal forecasting in Eurozone countries. *Journal of Economic Studies*. 838 – 860. Doi: 10.1108/JES-04-2014-0054
- Fauziah, Merdiana Hanifati. (2017). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun (2011-2015)). *Skripsi*. Universitas Muria Kudus. Diakses dari: <https://eprints.umk.ac.id>
- FITRA. (2016). Ketergantungan Pada Sektor SDA & Ruang Fiskal Kabupaten Indragiri Hulu. Riau: Tim RCC FITRA Riau Wilayah Indragiri Hulu 2015 Diakses dari : <http://fitrariau.org/wp-content/uploads/2016/02/Fact-sheet-ok.pdf>
- Goeminne, S., Geys, B., dan Smolders, C., (2008). Political fragmentation and projected tax revenues: evidence from Flemish municipalities. *International Tax Publication*. Finance 15. 297–315. Doi: 10.1007/s10797-007-9021-4
- Halim, Abdul dan Bawono, Icuk Rangga. (2011). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Hariadi, Pramono., Restianto, Yanuar E. dan Bawono, Icuk Rangga. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Hartanto, Rudy., dan Probohudono, Agung N. (2013). Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*
- Jones, Rowan dan Pendlebury, Maurice. (2010). *Public Sector Accounting*. Sixth Edition. Pitmen: London
- Jonung, L., Larch, M., Favero, C.A., Martin, P., (2006). Improving fiscal policy in the EU: the case for independent forecasts. *Economy Policy*. 21. 491–534. Diakses dari: <https://www.econpapers.repec.org>
- KPK (2014, Januari 26). *Siaran Pers Cegah Dana Bansos Dan Hibah Dari Penyalahgunaan*. Diakses dari: <https://www.kpk.go.id>
- Kusuma, Tiara Rahma dan Sutaryo. (2015). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Lago-Peñas, I. and Lago-Peñas, S. (2008). Explaining Budget Indiscipline: Evidence From Spanish Municipalities. *Public Finance and Management*. 8. 36–69.

- Lane, Jan-Erik. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Maulana, Candra. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Terdapat Di Pulau Jawa Tahun 2013). Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Diakses dari: <https://www.lib.unnes.ac.id>
- Mayper, A.G., Granof, M. and Giroux, G. (1991). An Analysis of Municipal Budget Variances *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 4. 29–50.
- Monika, Koppl Turyna., Kula, Grzegorz., Agata, Balmas., dan Waclawska, Kamila (2015). The Effect of Fiscal Autonomy On The Size Of Public Sector and The Strength Of Political Budget Cycles in Local Expenditure. *Munich Personal RePEc Archive* No. 66877. Diakses dari: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66877/1/MPRA_paper_66877.pdf
- Mulyana, Budi. (2010). *Modul Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian keuangan Republik Indonesia.
- Penner, Rudolph G. (2001). Errors in Budgeting Forecasting. *Washington DC:Urban Institute*. Diakses dari: <https://www.urban.org>
- Putri, Yuliana Maesa. (2018). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan dan Belanja Daerah terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Sumatera. *Skripsi thesis*. Universitas Negeri Padang.
- Rossa, Daniyah Ainur (2017). Political And Socio-Economic Factors Behind Budget Deviation In The Indonesian Local Government’s Electoral Cycle. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret
- Serritzlew, S. (2005). Breaking Budgets: An Empirical Examination of Danish Municipalities. *Financial Accountability and Management*. 21. 413–35
- Skala Survei Indonesia. (2016). *Laporan Penelitian Hasil Pilkada Serentak 2015*. Diakses dari: <http://skalasurvei.com/wp-content/uploads/2016/01/LAPORAN-HASIL-PENELITIAN-PILKADA-2015.pdf>
- Supriyanto, Y. (2015). Pengaruh Ruang Fiskal dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikasi Korupsi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2010-2012). *Tesis*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dari: <https://eprints.uns.ac.id>
- Subaweh, Imam. (2008). *Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*. Diakses dari: <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/imas/2008/9/03>
- Sutaryo, dan Winarna, Jaka. (2013). Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*.
- Sutaryo, dan Rahma, Tiara. (2015). Pengaruh factor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Syahida, Alfian Faiz. (2017). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat dan Faktor Keuangan Pada Budget Forecast Error Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

Syukur, M. (2015, Juli 15). *Bupati Bengkalis Jadi Tersangka Dana Bansos Rp 290 Miliar*. Liputan6. <https://www.liputan6.com>

Toyudho, Eko Siswono. (2016, November 24). Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Divonis 6 Tahun Penjara. Tempo. <https://nasional.tempo.co>

Widyastuti, Rifqi (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budget Forecast Errors Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York, Free Press

Lampiran

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BFE	197	.012	.353	.08544	.048904
KOALISI	197	.000	1.000	.36981	.191503
KOMPETISI	197	.0	1.0	.635	.4828
POPULASI	197	18186	3534114	511123.27	575250.236
FISKAL	197	.075	.703	.35432	.145037
Valid N (listwise)	197				

Analisis Statistik Frekuensi untuk Variabel Kompetisi Politik

KOMPETISI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	72	36.5	36.5	36.5
1	125	63.5	63.5	100.0
Total	197	100.0	100.0	

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		197
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0068698
	Std. Deviation	.47853403
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.035
	Negative	-.059
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.840	.347		-8.177	.001		
KOALISI	.231	.180	.089	1.284	.192	.903	1.107
KOMPETISI	.209	.074	.196	2.803	.003	.892	1.121
POPULASI	.060	.028	.153	2.169	.016	.960	1.042
FISKAL	.209	.073	.200	2.840	.001	.970	1.031

a. Dependent Variable: BFE

c. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.600	.220		3.904	.002
KOALISI	-.034	.114	-.022	-.344	.731
KOMPETISI	.072	.047	.110	0.80	.936
POPULASI	-.014	.017	-.060	-.956	.340
FISKAL	.080	.047	.125	1.554	.122

a. Dependent Variable: RES_2

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL ^b		. Enter

a. Dependent Variable: BFE

b. All requested variables entered

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.306 ^a	.094	.074	.474011

a. Predictors: (Constant), KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL

Faktor yang mempengaruhi Kesalahan Proyeksi Anggaran

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.405	4	1.101	4.901	.001 ^b
Residual	42.690	190	.225		
Total	47.095	194			

a. Dependent Variable: BFE

b. Predictors: (Constant), KOALISI, KOMPETISI, POPULASI, FISKAL

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.840	.347		-8.177	.001
KOALISI	.231	.180	.089	1.284	.192
KOMPETISI	.209	.074	.196	2.803	.003
POPULASI	.060	.028	.153	2.169	.016
FISKAL	.209	.073	.200	2.840	.001

a. Dependent Variable: BFE



SERTIFIKAT



FEB UNCEN



Diberikan Kepada:

SITI MAGHFIROH

Sebagai

PENULIS

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXII

*Hen Tecahi Yo Onomi Indonesia (Satu Hati Membangun Indonesia):
Peran dan Tantangan Akuntan Pendidik untuk Mendorong Praktik Good Governance dan
Pencegahan Fraud di Era Revolusi Industri 4.0.*

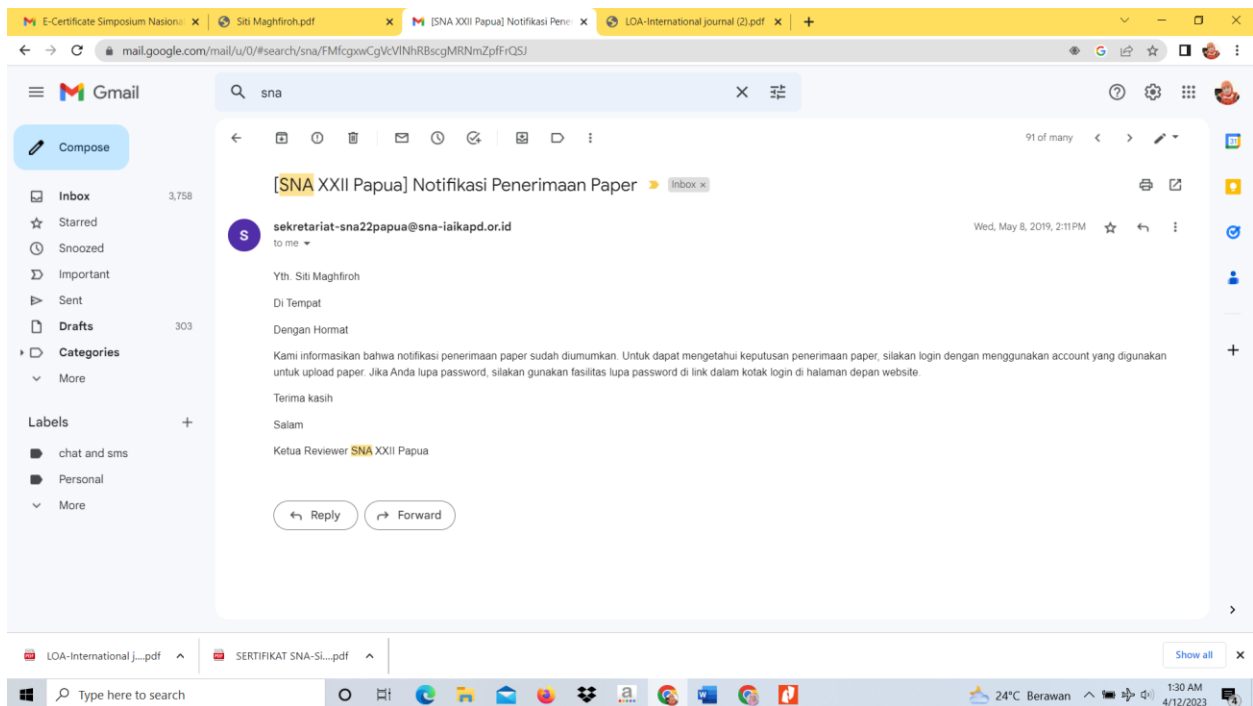
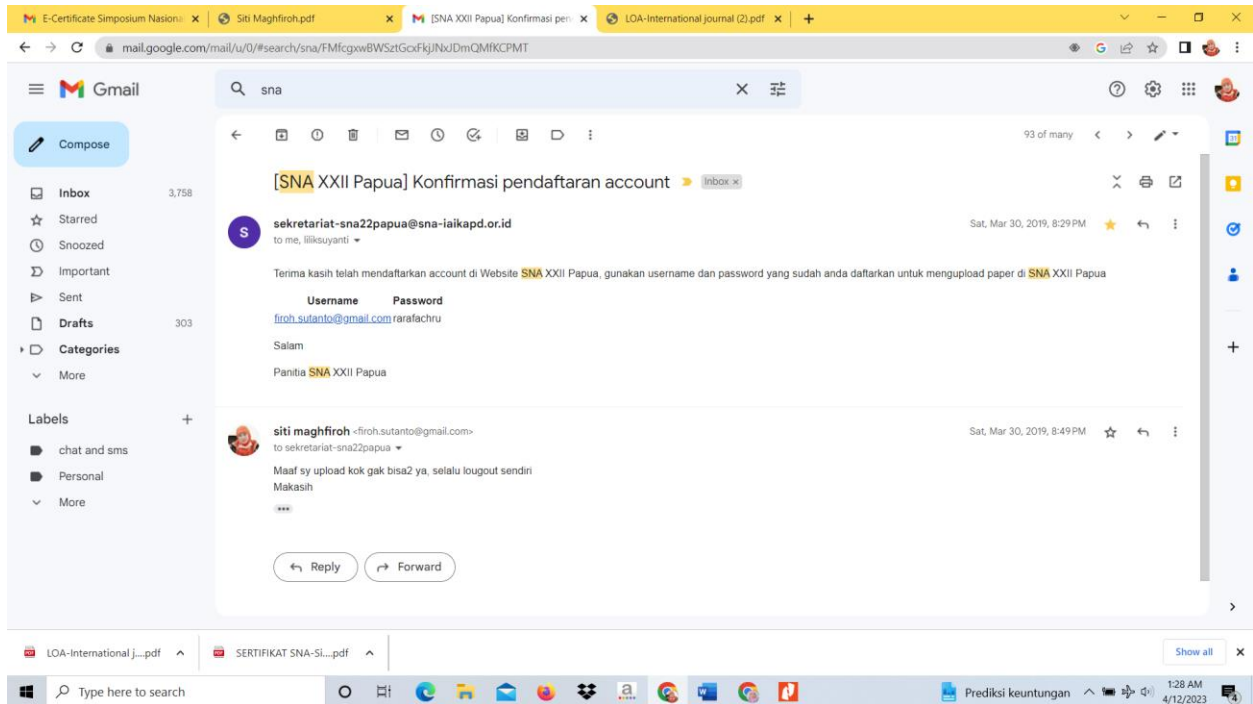
diselenggarakan oleh
Kompartemen Akuntan Pendidik Ikatan Akuntan Indonesia
bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih
pada tanggal 8 - 9 Oktober 2019

Jayapura, 9 Oktober 2019
Kompartemen Akuntan Pendidik IAI

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA

Ketua

SEBAGAI KORESPONDEN SNA PAPUA



Penundaan Pelaksanaan **SNA XXII Papua**

Reza Fauzi <reza.fauzi@iaiglobal.or.id>
to

Yth. Peserta Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXII Papua
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Peserta **SNA XXII Papua** di Universitas Cenderawasih yang telah melakukan registrasi sebelumnya. Sebagai Asosiasi Profesi yang menaungi Akuntan di seluruh Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertanggungjawab meningkatkan kapasitas keilmuan dan profesionalisme para anggotanya. IAI menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi (**SNA**) sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas akuntan pendidik, sekaligus ajang untuk mempresentasikan hasil riset terbaik di bidang akuntansi, bisnis dan keuangan. **SNA** yang direncanakan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, Papua, merupakan **SNA** ke-22 sejak diselenggarakan pertamakali pada tahun 1997 di Yogyakarta.

Dengan mempertimbangan berbagai hal, Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI telah memutuskan penundaan pelaksanaan Simposium Nasional Akuntansi (**SNA**) ke-22 di Universitas Cenderawasih, Papua, yang sedianya dijadwalkan pada 10-12 September 2019, hingga waktu yang ditentukan kemudian. Terlampir kami sampaikan informasi penundaan pelaksanaan **SNA** ke-22 di Universitas Cenderawasih, Papua.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat memahami kondisi *force majeure* ini dan mohon maaf serta pengertiannya atas penundaan pelaksanaan **SNA XXII Papua**. Semoga dengan keputusan ini kita bersama dapat memiliki waktu dan kondisi yang jauh lebih baik untuk melaksanakan **SNA XXII Papua** dengan partisipasi peserta yang lebih luas.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi IAI di 021 31904232 atau email ke registrasi@iaiglobal.or.id / reza.fauzi@iaiglobal.or.id. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Pelaksanaan **SNA** ke-22 pada 8-10 Oktober 2019 di Universitas Cenderawasih, Papua

Reza Fauzi <reza.fauzi@iaiglobal.or.id>
to

Yth. Peserta Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXII Papua
Di-
Tempat

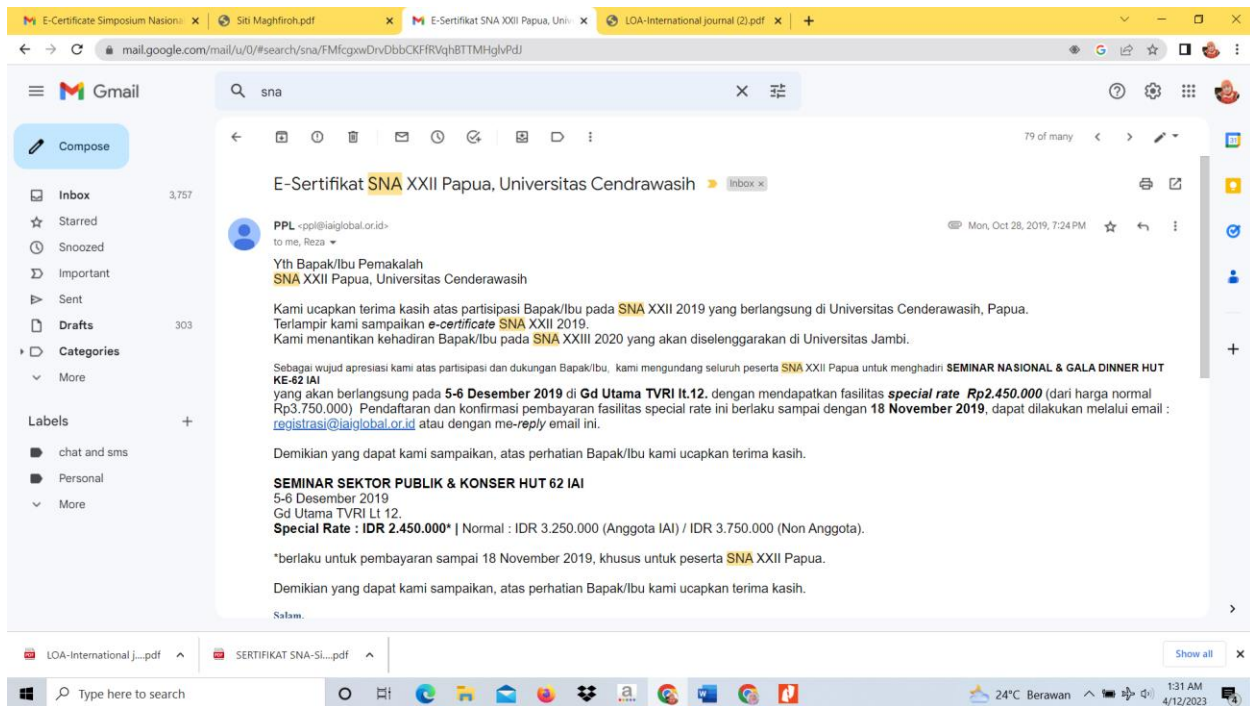
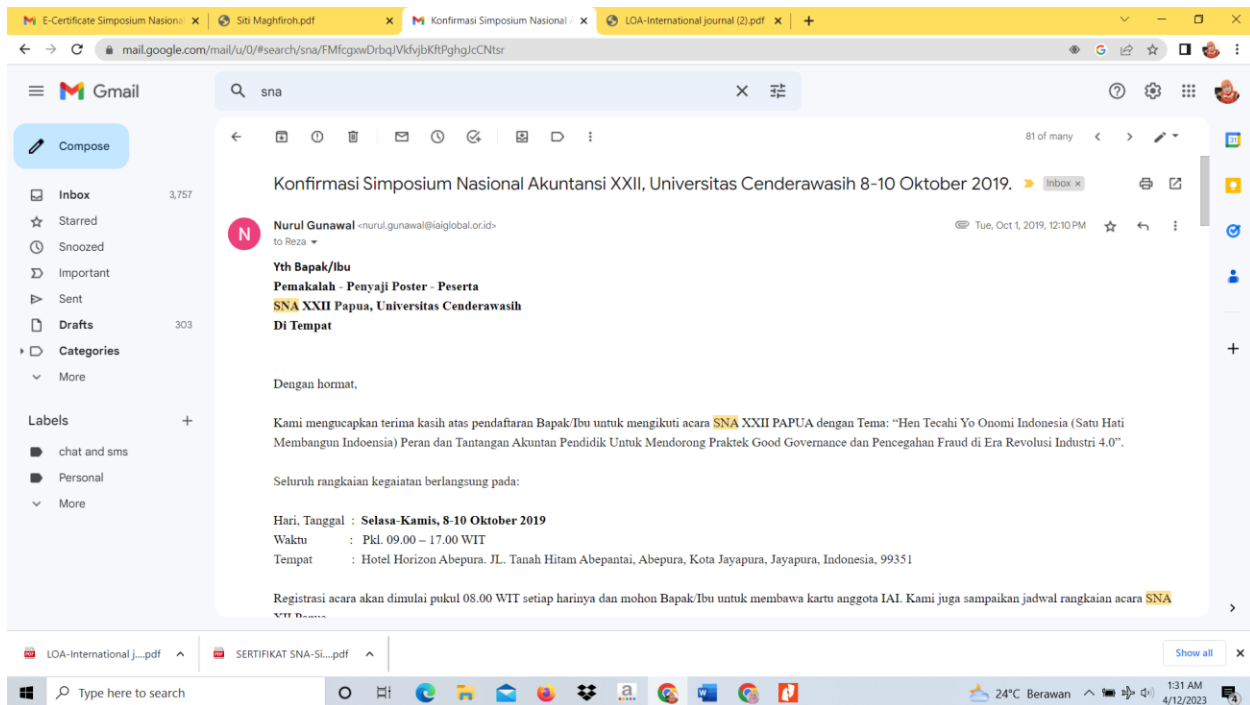
Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengembangkan pendidikan tinggi akuntansi, IAI setiap tahun menyelenggarakan Simposium Nasional Akuntansi (**SNA**).

SNA merupakan perhelatan ilmiah akbar yang dilaksanakan secara rutin oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) untuk mengkaji atau mengkomunikasikan perkembangan dan hasil riset akuntansi dari para praktisi dan peneliti bidang akuntansi dari seluruh wilayah di Indonesia.

Menindaklanjuti surat nomor 1386/DE/IAI/IX/2019 perihal Penundaan Pelaksanaan **SNA XXII Papua**, dengan ini kami sampaikan bahwa Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) memutuskan pelaksanaan Simposium Nasional Akuntansi (**SNA**) ke-22 di Universitas Cenderawasih, Papua, akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Selasa – Kamis, 8 – 10 Oktober 2019
Waktu	: 09.00 – 17.00 WIT
Tempat	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (FEB UNCEN) Jayapura, Papua
Tema	: <i>"Ben Tecihi Jo Onomi Indonesia (Satu Hati Membangun Indonesia)"</i> : Peran dan Tantangan Akuntan Pendidik untuk Mendorong Praktik <i>Good Governance</i> dan Pencegahan Fraud di



LOA-International journal (2).pdf x +

mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMlCgwwDrVDbbCKFRVqhbTtMHgVpdJ

Gmail

Compose

Inbox 3,757

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 303

Categories

More

Labels

chat and sms

Personal

More

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Salam,

Gunawal, Nurul
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants
 Griha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310
Phone: +6221-3190 4232 | HP: +6285777872011
Fax: +6221-390 0016 | www.iaiglobal.id

E-mail atau file ini bersifat rahasia dan ditujukan hanya untuk penggunaan pribadi atau badan kepada siapa yang mereka ditujukan. Jika Anda bukan penerima yang dituju, atau orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka, Anda tidak boleh menyalin, meneruskan mengungkapkannya atau menggunakannya dengan cara apapun. Untuk melakukannya termasuk tindakan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima e-mail karena kesalahan, mohon Anda segera memberitahu pengirim. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward disclose or otherwise use it or any part of it in any way. To do so may be unlawful. If you receive this e-mail by mistake, please advise the sender immediately. Please consider the environment before printing this email.

One attachment • Scanned by Gmail



SITI MAGHFIROH...

LOA-International j...pdf

SERTIFIKAT SNA-SI...pdf

Show all

Type here to search

24°C Berawan

1:32 AM 4/12/2023

E-Certificate Simposium Nasional... x

Siti Maghfiroh.pdf x

E-Sertifikat SNA XXII Papua, Uni... x

LOA-International journal (2).pdf x +

mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMlCgwwDsFgmDsbvJPzkvSxCGBQMgLUq

Gmail

Compose

Inbox 3,757

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 303

Categories

More

Labels

chat and sms

Personal

More

Griha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310
Phone: +6221-3190 4232 | HP: +6285777872011
Fax: +6221-390 0016 | www.iaiglobal.id



E-mail atau file ini bersifat rahasia dan ditujukan hanya untuk penggunaan pribadi atau badan kepada siapa yang mereka ditujukan. Jika Anda bukan penerima yang dituju, atau orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka, Anda tidak boleh menyalin, meneruskan mengungkapkannya atau menggunakannya dengan cara apapun. Untuk melakukannya termasuk tindakan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima e-mail karena kesalahan, mohon Anda segera memberitahu pengirim. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward disclose or otherwise use it or any part of it in any way. To do so may be unlawful. If you receive this e-mail by mistake, please advise the sender immediately. Please consider the environment before printing this email.

One attachment • Scanned by Gmail



DEWI MUSTIKA.pdf

LOA-International j...pdf

SERTIFIKAT SNA-SI...pdf

Show all

Type here to search

24°C Berawan

1:32 AM 4/12/2023

